

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Laporan UNICEF tahun 2000, anak di bawah usia 18 tahun yang tereksplorasi secara seksual dilaporkan mencapai 40-70 ribu anak. Sementara itu, menurut Pusat Data dan Informasi CNSP Center, pada tahun 2000, terdapat sekitar 75.106 tempat pekerja seks komersial yang terselubung ataupun yang terdaftar. Diperkirakan 30% dari penghuni rumah bordil di Indonesia adalah perempuan berusia 18 tahun ke bawah atau setara dengan 200-300 ribu anak-anak. Malaysia melaporkan terdapat 6.750 pekerja seks komersial (PSK) dan 62,7% dari jumlah PSK tersebut berasal dari Indonesia atau sekitar 4.200 orang dan 40% dari jumlah tersebut adalah anak-anak berusia antara 14-17 tahun.<sup>1</sup> Anak-anak sebagai korban eksploitasi seksual dapat ditemui mulai dari lokasi resmi hingga di hotel berbintang, taman, plaza, cafe/diskotik, jalanan tempat ABG (Anak Baru Gede) berkumpul, baik di kota besar maupun kota kecil. Fakta menunjukkan bahwa telah ditemukan ratusan anak-anak di bawah usia 16 tahun dipekerjakan di tempat-tempat prostitusi.

Anak yang dieksplorasi secara seksual tersebut seringkali mengalami penyiksaan, pemukulan, dan pelecehan seksual yang tidak berperikemanusiaan oleh klien, mucikari, dan geromo. Dampaknya ke anak adalah berupa kerugian

---

<sup>1</sup>Arist Merdeka Sirait. 2010. *Eksplorasi Seksual Komersial Mengintai Anak Kita*. <http://www.djpp.depkmham.go.id>. diakses 2 Agustus 2016

secara fisik, seperti anak-anak yang mengalami eksploitasi secara seksual dan komersial sangat beresiko terjangkit HIV/AIDS. Anak-anak juga sangat rentan terhadap kekerasan fisik. Dampak-dampak psikologis dari eksploitasi seksual dan ancaman-ancaman yang dipergunakan biasanya akan membekas sepanjang sisa hidup. Anak akan mendapat tekanan psikologis seperti trauma, stres, bahkan ingin bunuh diri.

Upaya yang dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana eksploitasi anak dapat berupa tindakan represif maupun tindakan preventif. Melalui tindakan preventif ini, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kota Surakarta melaksanakan tugasnya dengan konsep dan pola pembinaan dalam wujud pemberian pengayoman, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat agar masyarakat merasa aman, tertib dan tentram dalam menjalankan aktifitasnya sehari-hari. Sedangkan tindakan represif dilakukan dengan mengadakan penyidikan, penuntutan, dan pengadilan atas tindak pidana tersebut. Tentunya tindakan represif ini merupakan tugas dari Kapolresta Kota Surakarta dalam bidang penegakan hukum sebagaimana menjadi tugas serta amanat sesuai ketentuan dalam perundang-undangan.

Diberlakukannya Undang-Undang (UU) Perlindungan Anak yaitu UU No. 23 Tahun 2002 sebagaimana yang telah dirubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas berakhlak mulia dan sejahtera. Menurut Pasal 11 UU No. 23 tahun 2002 disebutkan pula bahwa "Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri". Selanjutnya Pasal 88 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 mengatur bahwa: "Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)".

Perlindungan hukum secara khusus kepada korban, khususnya korban eksploitasi terhadap anak tidak serta merta dapat diterapkan begitu saja, akan tetapi harus dilakukan dengan mengikuti prosedur tertentu, seperti dibutuhkan surat keterangan dari pemerintah setempat yang menyatakan bahwa anak tersebut membutuhkan perlindungan oleh hukum dan juga dengan melihat atau mengkaji seberapa besar ancaman hukuman yang bisa dikenakan terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi anak.

Oleh karena itu dilakukan penelitian dengan judul: **Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi (Studi Putusan Hakim No. 201/PID.SUS/2016/PN.SKT dan 26/PID.SUS/2014/PN.KB).**

## **B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimanakah Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Putusan Pengadilan No. 201/Pid.Sus/2016/PN.SKT dan 26/Pid.Sus/2014/PN.KB?

2. Hambatan pelaksanaan perlindungan hukum Pidana Terhadap anak menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan solusinya?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pidana Eksploitasi Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
2. Mengetahui hambatan Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan solusinya.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis
  - a. Untuk menambah khazanah pengembangan ilmu hukum pidana
  - b. Sebagai bahan informasi atau referensi bagi kalangan akademisi dan calon peneliti yang akan melakukan penelitian lanjutan tentang tindak pidana eksploitasi anak
2. Manfaat Praktis
  - a. Sebagai bahan masukan bagi aparat penegak hukum dalam penegakan hukum perlindungan anak
  - b. Sebagai bahan informasi atau masukan bagi proses pembinaan kesadaran hukum bagi masyarakat untuk mencegah terulangnya peristiwa yang serupa.

- c. Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah agar lebih memperhatikan penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam penegakan hukum perlindungan anak.

## **E. Kerangka Pemikiran**

Eksplorasi anak adalah pemanfaatan untuk keuntungan sendiri melalui anak dibawah umur. Dengan kata lain anak-anak digunakan sebagai media untuk mencari uang”. ’Pengertian secara umum eksploitasi terhadap anak adalah mempekerjakan seorang anak dengan tujuan ingin meraih keuntungan.<sup>2</sup>

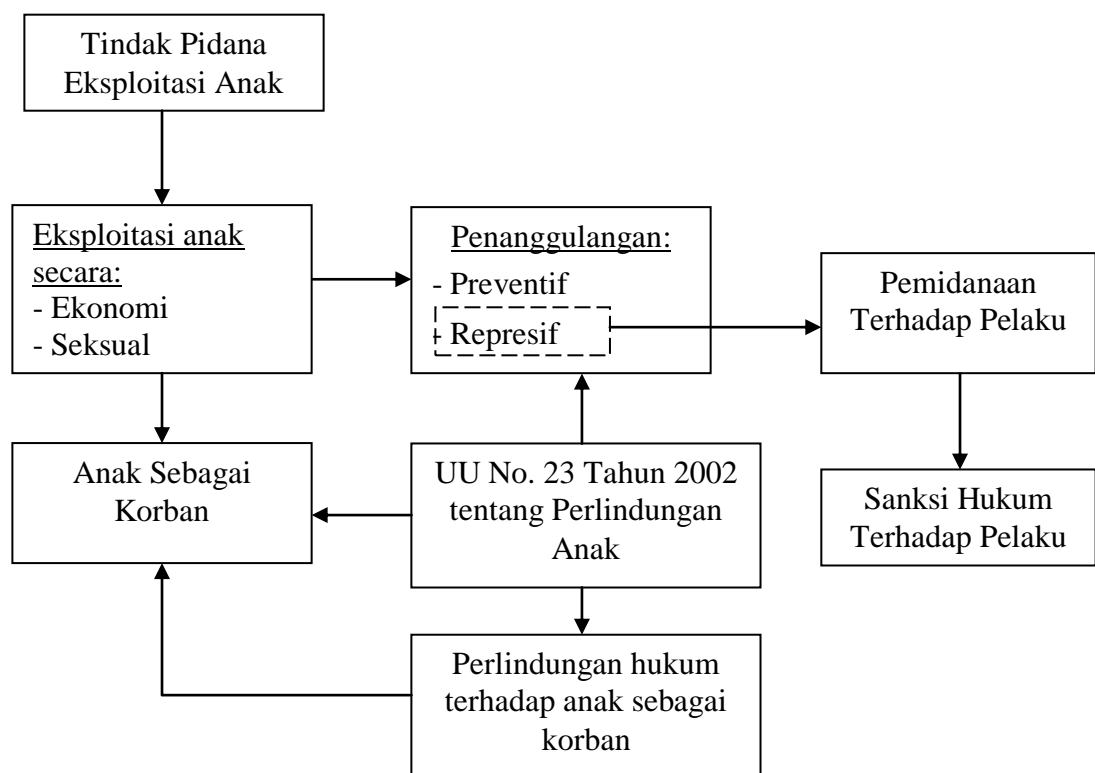
Pengeksplorasi terhadap anak tentunya akan mengganggu pendidikan, kesehatan dan perkembangan fisik, mental, spiritual dan moral sosial anak. Oleh sebab itu tidak jarang muncul kasus-kasus yang menelan korban yaitu anak-anak. Kenyataan ini menimbulkan motivasi penulis untuk menulis tentang upaya penanggulangan terhadap eksploitasi anak mengingat bahwa anak adalah generasi penerus cita-cita bangsa dan negara, mereka harus dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang dewasa yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, bahagia, berpendidikan, bertanggung jawab, bermoral tinggi serta berwatak terpuji.

Masih tingginya tindakan eksploitasi anak secara ekonomi dan atau secara seksual diasumsikan karena Undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang belum cukup memberi sanksi terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi anak. Oleh karena itu, pelaku eksploitasi anak

---

<sup>2</sup>Piri, Megalia Tifan, 2013, *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Eksploitasi Anak (Kajian Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002)*, Jurnal Hukum Lex Administratum, Vol.I/No.2/Apr-Jun/2013, hal 2

secara ekonomi dan atau secara seksual tidak takut atau meremehkan sanksi yang ada dalam UUPA tersebut. Untuk itu, diperlukan telaah terhadap upaya represif yang dilakukan para penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana eksploitasi anak. Kerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 1.1. Kerangka Pemikiran**

## F. Metode Penelitian

### 1. Metode Pendekatan

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif atau penelitian doktrinal<sup>3</sup> yang melakukan kajian terhadap putusan pengadilan

<sup>3</sup>Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, halaman 158 – 159

No. 201/Pid.Sus/2016/PN.SKT dan No. 26/Pid.Sus/2014/PN.KB tentang kasus eksploitasi anak.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, karena penelitian ini akan mendeskripsikan peraturan hukum tentang eksploitasi anak dalam hal perlindungannya sebagaimana dalam putusan hakim.

## 3. Sumber Data

### a. Data Sekunder

Sumber-sumber data yang diperoleh dari dokumen peraturan hukum serta lieteratur atau referensi yang relevan dengan rumusan masalah yang diteliti. Selain Itu Juga Putusan Hakim Tentang Eksploitasi Anak Dalam penelitian ini data sekunder terdiri dari sejumlah data yang diperoleh dari buku-buku literatur dan perundang-undangan mengenai kasus yang terkait.

Jenis data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer meliputi: Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,
- 2) Bahan Hukum Sekunder dalam bentuk putusan hakim yaitu putusan hakim No 201/Pid.Sus/2016/PN.SKT dan 26/Pid.Sus/2014/PN.KB

- 3) Bahan Hukum Tersier: menunjang bahan-bahan sekunder seperti kamus hukum dan kamus bahasa.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

##### a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan peneliti dengan inventarisasi dan identifikasi literatur, jurnal dan dokumen hukum termasuk putusan hakim yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

#### 5. Metode Analisis Data

Data yang telah terkumpul dan telah diolah akan dianalisis dan dibahas dengan menggunakan metode normatif kualitatif, yakni suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara menafsirkan dan mendiskusikan data-data yang telah diperoleh dan diolah, berdasarkan (dengan) norma-norma hukum, doktrin-doktrin hukum dan teori ilmu hukum yang ada.<sup>4</sup>

### **G. Sistematika Skripsi**

Dalam rangka mempermudah para pembaca dalam memahami isi skripsi ini, maka perlu dikemukakan sistematika skripsi sebagai berikut :

BAB I adalah Pendahuluan yang berisikan gambarann singkat mengenai isi skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, Pembatasan Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematikan Penulisan.

---

<sup>4</sup>Kudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Surakarta: UMS Press, Hal 38



BAB II adalah Tinjauan pustaka yang terdiri dari Tinjauan umum tentang tindak pidana dan pemidanaan, Tinjauan umum tentang anak dan eksploitasi anak, serta Konsep dan ruang lingkup penanggulangan kejahatan.

BAB III adalah hasil Penelitian dan Pembahasan dimana penulis akan menguraikan dan membahas mengenai: Gambaran mengenai latar belakang terjadinya tindak pidana eksploitasi anak di Kota Surakarta, Upaya penanggulangan terhadap tindak pidana eksploitasi anak di Kota Surakarta, dan Hambatan-hambatan yang muncul dalam upaya penanggulangan terhadap tindak pidana eksploitasi anak di Kota Surakarta.

BAB IV adalah penutup, yang berisi mengenai kesimpulan dan saran terkait dengan permasalahan yang diteliti.